



**SELUMA**

**RABU, 15 JUNI 2022**

**SUMBER BERITA**

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

## Pembahasan LKPJ Bupati Tunggu Naskah LHP BPK

**SELUMA** - Dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi atas nota pengantar/penjelasan Bupati Seluma terhadap Raperda Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD Kabupaten Seluma tahun anggaran 2021. Sejumlah catatan dan rekomendasi disampaikan oleh setiap fraksi. Namun untuk pembahasan di tingkat sampai anggota DPRD Seluma sampai saat ini, belum menerima naskah LHP BPK sehingga tidak bisa melakukan pembahasan.

"Pembahasan belum bisa kami lakukan karena dokumen LHP BPK sampai saat ini belum kami terima, sehingga meminta agar dokumen LHP BPK bisa diberikan kepada setiap anggota DPRD," sampai anggota DPRD Seluma fraksi PKS dalam pandangan umum H. Suhandi, S.Sos.

Ia mengatakan, dalam Raperda APBD tahun 2021 pertama sangat disayangkan belanja dan pendapatan yang tidak mencapai target. Kemudian dalam APBD 2021 masih banyak kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dikerjakan atau ditunda artinya target tidak bisa dilaksanakan.

"Kita minta eksekutif menjelaskan kenapa kegiatan tidak terlaksana sehingga uang ke balik ke kas negara padahal tidak ada alasan jika perencanaan sudah menyeluruh," jelasnya.

Kemudian DPRD meminta setiap LKPJ bupati harus dilampirkan catatan dan BPK terkait dinas yang terjadi penyimpangan. Karena meskipun telah diaudit BPK masih ada OPD yang penyimpangan.

"Maka dari itu bupati agar lebih serius menangani OPD tersebut dan temuan BPK segera ditindak lanjuti sehingga kedepan lebih baik," terangnya.

Tambahkannya, agar eksekutif segera menindak lanjuti temuan dan catatan BPK serta temuan sejak lima tahun terakhir sehingga bisa dilakukan evaluasi apakah telah ditindak lanjuti atau belum. Kemudian setiap LJ dinas dilampirkan hasil tindak lanjut dari BPK dan hasil bisa terlihat apakah sudah ada progres tindak lanjut temuan sebelum.

Selain itu, pandangan umum Fraksi Nasdem disampaikan Tenno Heika, menyoroti terkait anggaran operasional yang ada di dinas pelayanan dan dinas pendapatan karena sejak pembangunan infrastruktur OPD ini terkesan diabaikan karena hampir di OPD anggaran dipangkas habis-habisan.

"Kita boleh membangun infrastruktur tapi jangan abai juga dengan OPD pelayanan dan pendapatan karena bagaimana mereka mau bergerak jika anggaran 0 persen, karena mustahil ASN ini mau kerja jika tidak ada dana," ungkapnya.

Kemudian terkait, Pemkab Seluma tahun ini gagal meraih Opini WTP atau meraih WDP perlu menjadi evaluasi semua pihak. Karena tahun lalu bupati hanya baru dua bulan dilantik bisa meraih WTP. Tapi sekarang bupati lebih dari satu tahun bertugas malah gagal raih WTP. "Tahun lalu bupati dilantik beberapa bulan bisa meraih WTP tapi tahun ini berjalan secara penuh tapi tidak WTP, ada apa," sampainya. **(juu)**